

## **Paradigma Kritis-Konstruktif: Ijtihad Pengembangan Paradigma Pendidikan Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama**

**Arhanuddin Salim**

*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara  
Email: arhanuddin@iain-manado.ac.id*

**ABSTRACT** *This study offers a constructive-critical paradigm as an effort to develop Islamic education in Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. Development of Islamic education paradigm of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama whose goal ultimately directs the learners into pious human beings to God. Freedom here is limited by the line of demarcation of the law and the teachings of the Shari'ah that are determined by God in line with the philosophy that underlies human nature. Learners are added by Muslims is a smart, meticulous, and able to think by using the mind well and responsible. This critical-constructive paradigm is used as a reference in developing Islamic education in Muhammadiyah and Nahdatul Ulama in the future.*

**Keywords:** Critical-constructive paradigm, Islamic education, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

**ABSTRAK** *Studi ini menawarkan paradigma kritis-konstruktif sebagai upaya pengembangan pendidikan Islam yang ada di Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Pengembangan paradigma pendidikan Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang tujuan akhirnya mengarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Kebebasan di sini di batasi oleh garis demarkasi hukum dan ajaran syariat yang ditentukan oleh Tuhan yang sejalan dengan filsafat yang mendasari fitrah manusia. Peserta didik didambakan oleh umat Islam adalah yang cerdas, cermat, dan mampu berpikir dengan menggunakan akalnyanya dengan baik dan bertanggung jawab. Paradigma kritis-konstruktif inilah yang dijadikan acuan dalam mengembangkan pendidikan Islam yang ada di Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama ke depan.*

**Kata Kunci:** Paradigma kritis-konstruktif, pendidikan Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini, wacana Pendidikan, telah menjadi *icon* yang menarik untuk diperbincangkan di kalangan pemikir pendidikan. Bahkan menyedot perhatian besar di kalangan pemerhati pendidikan. Hal ini, sejalan dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin pesat dan canggih akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pemikiran Islam sarat dengan pendidikan liberal (penuh kreativitas). Hal tersebut dipandang penting, namun pendidikan yang ada telah mengabaikan nilai fitrah manusia yang memiliki kebebasan. Nilai kebebasan yang ada di dalam diri individu manusia saat ini diambil alih oleh individu yang lain dengan mengatasnamakan demokrasi. Lebih nyata dalam realitas kehidupan, mengambil hak-hak individu yang lain melalui lembaga dengan dalih demokrasi dan kualitas.

Seorang pakar pendidikan Paulo Freire misalnya, memberikan ilustrasi bahwa pendidikan dewasa ini melalui lembaga sekolah membentuk insan-insan robot yang bekerja bagaikan mesin yang bekerja secara mekanik, manusia secara bertahap dipangkas kemerdekaan dan kebebasannya dalam bertindak. Secara sederhana Freire menegaskan bahwa “konsistensi yang absolut akan membuat hidup ini menjadi sebuah pengalaman yang tidak harum, tidak berwarna, dan tidak terasa” (Freire, 2003, p. 23). Atas dasar tersebut Freire memiliki konsep *deschooling*, belajar tanpa sekolah. Sebab belajar dapat dilakukan di luar institusi sekolah bahkan dalam ruangan terbuka sekalipun.

Pada dasarnya karakteristik pemikiran Islam mengenai pengembangan paradigma pendidikan (Kurzaman, 1988), cenderung bersifat organik, sistematis dan fungsional dengan akar paradigma yang mengacu pada Alquran, Sunnah, dan kreativitas berpikir (*liberal/ijtihad*). Fungsionalisasi pemikiran pengembangan paradigma pendidikan Islam merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi, maka itu bermakna manusia dapat mewujudkan kebaikan dan kemuliaan.

Bagi pendukung liberalisme pendidikan, kebaikan tertinggi adalah kecerdasan kritik-konstruktif yang dirumuskan dalam ranah pemecahan masalah secara efektif, baik ditingkat personal maupun sosial. Manusia bersifat rasional dan nalarnya sendiri saja mampu memapankan hubungan timbal balik yang diperlukan antara kepentingan diri yang tercerahkan dengan kepentingan-kepentingan terbaik orang lain secara menyeluruh (O’neil, 2002). Bagi kaum pendidik liberal, tujuan jangka panjang pendidikan adalah untuk melestarikan dan meningkatkan mutu tatanan sosial yang ada sekarang dengan cara mengajar setiap anak mengatasi masalah-masalah kehidupannya sendiri secara efektif (O’neil, 2002).

Dengan demikian, pendidikan Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, harus selalu mencerminkan nilai-nilai kebebasan (liberal) dari berbagai aspek yang sarat dengan fitrah manusia itu sendiri di manapun tempatnya selalu memberi kesejukan yang penuh muatan pendidikan, yang ujung-ujungnya memberi gagasan-gagasan segar yang lebih konstruktif, positif dan produktif. Citra pendidikan Islam seperti itulah yang mampu memenuhi logika dan dinamika persaingan di masa depan.

Sebagai konsekuensi logis dari tujuan manusia dalam pendidikan adalah kebebasan menuangkan ide-ide, yang tidak memungkinkan suatu individu memikul beban individu yang lain dan hanya berhak atas hasil kerjanya sendiri dalam bingkai akademik. Karenanya manusia harus secara terus menerus membuat berbagai pilihan dalam suatu kehidupan yang selalu menentanginya untuk mengubahnya. Dia mempunyai kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi setiap pilihan yang dilakukannya.

Jika pilihan bebasnya menunjukkan kepada hal-hal yang baik, maka ia akan menjadi seorang yang Mukmin yang tidak akan pernah larut dalam gulungan cakrawala, tapi sebaliknya, jika

pilihan itu pada hal-hal yang buruk, maka ia akan menjadi seorang kafir (pembangkang). Kerena itulah orang Mukmin dengan kebebasannya, tidak akan pernah kehilangan arah dalam menghadapi berbagai kemelut kemanusiaan. Ia tampil sebagai orang yang merdeka, merekayasa alam semesta yang diberikan padanya tetapi tidak menafikan aspek transendental. Tuhan sebagai Pembebas terakhir. Karena Orang Kafir larut dalam cakrawala dan orang Mukmin cakrawala larut dalam alam pikirannya.

Refleksi kebebasan berpikir sadar dan mengakui bahwa anugerah kebebasan manusia harus difungsikan dan bahwa fungsionalisasi kebebasan ini, merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab manusia sebagai khalifah Tuhan di Bumi, maka itu bermakna manusia dapat mewujudkan kebaikan.

## 2. Pembahasan

Pengembangan paradigma pendidikan Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang bermuara untuk memberdayakan kualitas umat dari berbagai aspek kehidupan umat. Hal itu, sejalan dengan semangat Alquran yang senantiasa menekankan rasa takwa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ditinjau dari kacamata ajaran risalahnya agama Islam adalah “agama madani” dalam arti mengkota, elite, dan berbudaya tinggi. Artinya seluruh ajaran Islam senantiasa mendorong pemeluknya bersikap rasional, menghargai waktu, memerhatikan hari esok (membuat perencanaan hidup) kreatif dan berkarya yang *exelence* (O’neil, 2002).

Pengembangan paradigma pendidikan Islam sebagai salah satu metode yang sangat *praksis*, identik dengan dakwah sering dipahami dengan nasihat dan peringatan yang mempunyai pengertian suatu ucapan/kata-kata yang bersifat bimbingan dan pengarahan yang dapat membangkitkan emosi dan perasaan orang lain untuk mau melaksanakan perbuatan yang baik (Al-Razi, 1994). Sejalan dengan hal tersebut, nasihat bisa dipahami dengan dukungan positif terhadap mereka, termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban (Shihab, 1996).

Islam merupakan agama yang memadukan iman dan ilmu yang melahirkan amal. Dengan demikian pengembangan paradigma pendidikan Islam diharapkan mampu menumbuhkembangkan pemahaman yang benar tentang hakekat keberadaan umat manusia di santero alam ini. Pendidikan dunia akhirat inilah yang bergaransi kelestarian nilai-nilai budaya Islam di masa-masa yang akan datang.

Pengembangan paradigma pendidikan sebagai satu pranata sosial terikat dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan manusia. Oleh karena itu, pengembangan paradigma pendidikan Islam berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran manusia itu sama di depan Tuhan. Pembedanya adalah kadar ketakwaan sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif (Q.S. Addukhān (44): 13).

Implementasi ketakwaan dapat diwujudkan lewat pencitraan pendidikan, hal ini penulis mencoba menampilkan sosok pemikir pengembangan paradigma pendidikan Islam yang dinamis dan berwawasan mensemesta seperti, A. Malik Fajar berpendapat bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Oleh karenanya pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan manusia. John Dewey, menurut penjelasannya, berpendapat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup, salah satu fungsi sosial, sebagai bimbingan, dan sebagai pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Fungsi pendidikan ini dapat dicapai melalui transmisi, baik melalui pendidikan formal, maupun nonformal (Fadjar, 1999).

Muhammad Abduh (1849—1905) dapat disebut sebagai tokoh yang banyak melakukan kritik terhadap praktik pendidikan yang dilakukan oleh umat Islam. Ia menilai bahwa metode pengajar-

an yang digunakan para guru adalah salah. Ia mencontohkan, para guru memberikan term-term tata bahasa Arab dan hukum fikih untuk dihafal tanpa menjelaskan arti term-term itu. Abduh, secara keras mengkritik pengajaran di al-Azhar Mesir. Abduh berpendapat bahwa pendidikan yang diamatinya cenderung menghasilkan lulusan dan masyarakat yang *jumud*, membeku, statis, tidak ada perubahan. Oleh karena paham *jumud* ini maka umat Islam ini tidak menghendaki perubahan, dan tidak mau menerima perubahan (Harun, 1995).

Selain Abduh, Fadhil al Jamali, sosok ilmuwan Muslim berkebangsaan Irak yang hijrah ke Tunisia kemudian menjadi Guru Besar dalam ilmu pendidikan di Universitas Tunis, juga tergolong orang yang terpanggil untuk memberikan berbagai kritik terhadap pengembangan paradigma pendidikan Islam. Ia mengakui bahwa umat Islam mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan disebabkan oleh berbagai kemunduran dan keterbelakangan bidang-bidang lain (Suwito, 2005). Seharusnya orang-orang yang bertugas di bidang pendidikan, menurutnya menyediakan obat penyembuh segala penyakit yang dilaporkan oleh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka sendiri malah menjadi orang sakit.

Menurut Suwito (2005), pesatnya perkembangan pendidikan di Indonesia dapat di-nilai cenderung menghasilkan pendidikan ke arah sistem yang bersifat birokratis sentralistik. Berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat cenderung sebagai “*sabda pandita ratu*” yang mesti harus dilaksanakan oleh daerah-daerah. Hal ini dapat dilihat antara lain sejak kemestian memakai pakaian seragam sampai hal-hal yang menyangkut kurikulum. Sistem yang demikian cenderung menjadikan “keseragaman” sebagai tujuan. Hasil kebijakan yang demikian adalah manusia-manusia yang bermentalitas “juklak” dan “juknis” menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ujung-ujungnya akan melahirkan manusia yang bermentalitas di bawah bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran sehingga harus patuh dan tunduk pada perintah yang ada, betapa pun anehnya perintah tersebut.

Kebijakan yang demikian dapat diduga karena pemerintah ketika itu cenderung berpendapat bahwa stabilitas nasional menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Stabilitas akan terwujud apabila pemerintah kuat dan mampu mengontrol kekuatan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang birokratis sentralistis membuahkan hasil antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pendapatan nasional meningkat, pembangunan berbagai sarana dan prasarana terlihat dan dapat dinikmati.

Akan tetapi, pendidikan yang terlalu birokratis sentralistis di atas dapat menimbulkan dampak negatif bagi proses pendidikan itu sendiri dan bagi masyarakat umum. Dampak yang paling mencolok adalah berkembangnya mentalitas “jalan pintas” dalam dunia pendidikan. Selain itu semakin lama semakin dirasakan bahwa praktik pendidikan cenderung memunculkan generasi terdidik yang bersifat materialistik.

A. Malik Fadjar, dalam gagasan liberalnya sebagaimana yang dikutip oleh Suwito, mengatakan bahwa Perguruan swasta di bawah Muhammadiyah, Taman Siswa, ataupun lembaga agama Kristen (dan swasta lainnya) lebih baik membebaskan dirinya dari pemikiran pemerintah. Pasalnya, keberadaan perguruan swasta merupakan cikal bakal pelopor pendidikan di tanah air yang sudah sejak lama independen. Peran pemerintah bagi perguruan swasta sebaiknya hanya menjadi mitra dalam konteks akademik dan mengurus hal-hal yang lebih teknis (Suwito, 2005).

Liberalisasi pendidikan pada intinya merupakan sebuah cabang pertumbuhan dan sudut pandang empiris yang kerangka berpikirnya dibangun pada *eksperimentalisme*, yang menaati gagasan bahwa nilai tertinggi kebahagiaan, perwujudan diri atau apa pun juga secara fundamental merupakan keluaran sampingan dari *kecerdasan praktis*, yakni kemampuan untuk memecahkan

problema-problema personal secara efektif dengan menjadi ilmiah mungkin dalam hal bagaimana orang berpikir rasional dan apa yang diyakininya.

Pendidikan yang diusulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritik-konstruktif terhadap dunia dan dengan demikian mengubahnya. Ia memperingatkan akan bahaya budaya industri sekalipun berhasil meningkatkan standar hidup tetapi dalam waktu yang sama budaya itu cenderung untuk menempatkan manusia sebagai posisi tercabut dari akar kemanusiaannya (Freire, 1997).

Dominasi yang memengaruhi umat adalah pendidikan yang “membelenggu” umat manusia sehingga tertindas, teraniaya di dalam hidupnya. Paulo Freire, kembali dengan lantang mengkritik pendidikan “gaya bank” yang mencerminkan masyarakat tertindas secara keseluruhan yang menunjukkan kontradiksi:

- a. Guru mengajar, peserta didik belajar.
- b. Guru mengetahui segala sesuatu, peserta didik tidak tahu apa-apa.
- c. Guru berpikir, peserta didik dipikirkan.
- d. Guru bercerita, peserta didik mendengarkan.
- e. Guru mengatur dan peserta didik diatur.
- f. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, dan peserta didik menyetujui.
- g. Guru berbuat, peserta didik membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya.
- h. Guru memilih bahan dan isi pelajaran, peserta didik menyesuaikan diri dengan dengan pelajaran itu.
- i. Guru mencampur adukkan kewenangan ilmu dan jabatan untuk menghalangi kebebasan peserta didik.
- j. Guru adalah subyek, peserta didik adalah obyek dalam proses belajar mengajar (Freire, 1984).

Paulo Freire agak prihatin dan khawatir terhadap kaum tertindas (*oppressed*) sehingga mendorong untuk mengantisipasi demi masa depan kemanusiaan. Kaum tertindas berada dalam lingkaran setan. Kaum tertindas yang menginternalisasikan citra diri kaum penindas dan menyesuaikan diri dengan jalan pikiran mereka mengalami rasa takut yang berat. Padahal kebebasan menghendaki mereka menolak citra diri seperti itu, dan menggantinya dengan perasaan bebas serta tanggung jawab moral yang lebih mendidik. Walaupun masyarakat memperoleh kemerdekaan jiwa itupun direbutnya bukan dihadiahkan (Freire, 1984).

Kebebasan bukanlah impian yang berada di luar manusia dan bukan pula sebuah gagasan yang menjadi mitos untuk kesempurnaan manusia, kebebasan merupakan keniscayaan. Untuk mencari dan mendapatkan kebebasan itu, perlu ditemukan sumber penyebab terjadinya penindasan kemudian melakukan tindakan perubahan yang mengakibatkan terbentuknya manusia yang lebih berkualitas.

Manusia modern dikuasai oleh kekuatan mitos-mitos dan dimanipulasi oleh ikatan-ikatan yang jitu, kampanye ideologi, dan lainnya tanpa disadari lambat laun membuat manusia kehilangan kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan. Manusia tidak bisa menangkap sendiri tugas zaman melainkan hanya menerima penafsiran resep dan perintah yang dibuat kaum “elite”.

Dalam dunia pendidikan, kritik tajam itu menuntut adanya reorientasi dalam pendidikan dan pengajaran. Dan itulah membuat umat semakin dinamis dan *survive* (hidup). Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa pada masa renaisans (*renaissance*) unsur yang paling utama diambil adalah tuntutan kebebasan dan pembebasan dari berbagai ikatan dan halangan agar perkembangan manusia serta bakatnya dapat terwujud leluasa. Sedangkan dari masa *aufklaerung* yang diambil adalah moral rasionalismenya, keberanian untuk memakai kemampuan akal budi

secara bebas (Soedjatmoko, 1984). Jika diikuti pendapat Soedjatmoko dikatakan lagi bahwa, yang kita butuhkan adalah pembebasan dari rasa tidak berdaya dan dari ketergantungan, dan dari rasa cemas rasa keharusan untuk mempertanyakan apakah tindakan-tindakan mereka diizinkan atau tidak diizinkan oleh wewenang yang lebih tinggi ataupun oleh adat kebiasaan (Q.S. Arrad' (13): 11).

Pengembangan paradigma pendidikan Islam Muhammadiyah dan NU yang tujuan akhirnya mengarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Kebebasan di sini di batasi oleh garis demarkasi hukum dan ajaran syariat yang ditentukan Allah yang sejalan dengan filsafat yang mendasari fitrah manusia. Umat yang didambakan Islam adalah yang cerdas, cermat dan mampu berpikir dengan menggunakan akalunya dengan baik dan bertanggung jawab.

Umat yang berkualitas mengikuti perintah Tuhan yang terkandung dalam Alqurān, ini bermakna umat itu memiliki kebebasan diri sehingga mampu mengubah nasibnya (Raharjo, 1992). Tidak fatalistik pasrah kepada takdir. Orang yang pasrah itulah yang membuat umat tidak bebas sehingga ada yang mensinyalir bahwa umat Islam tidak berdaya akhirnya mundur akibat didominasi oleh pemikiran teologi Asy'ariah yang cenderung bersifat Jabariah (Amin, n.d.).

Terdapat beberapa argument yang dikemukakan Freire mengenai kesadaran manusia mengenai kebebasan yaitu: *Pertama*, kesadaran magis (*magical consionsnes*) yakni, jika masyarakat tidak memahami mengapa mereka menjadi miskin, serta menyerahkan dan mengembalikan mereka pada Tuhan. Kesadaran magis ini juga oleh kaum pembaharuan dikenal dengan teologi fatalisme yang dianggap penyebab keterbelakangan. *Kedua*, tingkat kesadaran yang naif (*naive conscionsness*) yakni jika masyarakat percaya bahwa kemiskinan dan keterbelakangan mereka disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Dan kemajuan orang hanya dicapai karena mentalitas dari usaha mereka. Mereka yang berada pada tingkat kesadaran ini sering kali juga mewarisi sebagai penindas. *Ketiga*, kesadaran kritik-konstruktif (*critical conscionsness*). Kesadaran kritik-konstruktif adalah tingkat kesadaran yang memahami bahwa ke-miskinan dan keterbelakangan mereka disebabkan oleh suatu struktur yang tidak adil dan mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan mereka (Fakih, 1992). Reaksi dan aksi yang dilahirkan oleh tingkat kesadaran naif yakni kesadaran yang ditanamkan oleh pendidikan dan lembaga harus diubah menjadi umat yang berkualitas dan berprestasi.

Bertalian dengan itu, Andi Rasydianah dalam butir-butir pengarahannya Dirjen Bim-baga Islam 1995 di Bandung mengatakan bahwa pemaknaan materi pengembangan pendidikan Islam pada bidang teologi ada kecenderungan pada paham fatalistik. Bidang akhlak berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipakai sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama. Agama diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan kepada kemajuan pada ilmu pengetahuan dan yang paling akhir adalah orientasi mempelajari Alquran masih cenderung pada kemampuan membaca teks belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna (Rasydianah, 1995).

Kurikulum tradisional terlepas dari kehidupan yang berpusat dari kata-kata kosong yang tidak menampilkan realitas, tidak menunjukkan aktivitas kongkrit dan tidak pernah mengembangkan kesadaran kritik-konstruktif seharusnya direformasi (dibebaskan). Memang ketergantungannya pendidikan secara naif pada ungkapan-ungkapan muluk pada hafalan dan kecenderungan kepada yang abstrak sesungguhnya mengundang kenaifan (Karim, 2005).

Peneliti mengharapkan pendidikan mampu merangsang pikir dan zikir manusia untuk diberdayakan agar mampu mandiri dalam rangka menciptakan gagasan-gagasan pemikiran yang otentik dan original. Tradisi pendidikan bagaimanapun juga tidak merupakan pertukaran ide-ide,

melainkan pendiktean ide-ide itu, bukan merupakan debat atau diskusi tema-tema, melainkan pemberian pelajaran atau kuliah; bukan merupakan kerja sama dengan murid melainkan kerja atas murid, memaksakan suatu perintah yang harus dituruti oleh para murid. Dengan memberi rumusan-rumusan yang harus diterima oleh para murid dan bukan memberikan perangkat untuk berpikir otentik kepadanya (Karim, 2005). Hal ini dapat kita lihat pola lewat kurikulumnya yang didesain secara komprehensif dan tidak mengikat, tapi memberi opsi yang bebas pada peserta didik.

Untuk memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan di atas Hoyle mengeksplorasi pemikirannya guna mengadakan perubahan dalam pendidikan sebagai berikut: 1) *Power-coercive* 2) *Normative-reeducative* dan, 3) *Rational empirical* (Mansur, 2006). Strategi *power-coercive* biasanya digunakan ketika yang dikehendaki dalam perubahan pendidikan tersebut berhubungan dengan persoalan kelembagaan dan struktur pendidikan. Sedangkan strategi *normative-reeducative* digunakan ketika yang diinginkan berhubungan dengan perubahan sikap dan sifat, pendapat-pendapat dan nilai-nilai tertentu yang diinginkan. Untuk strategi *rational empirical* digunakan ketika yang diinginkan dari perubahan pendidikan tersebut berhubungan dengan aspek praktisnya dilihat dari aspek-aspek pendidikan yang lebih ringan.

Apabila dihubungkan dengan pembicaraan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi, hal tersebut berada pada persoalan-persoalan perubahan kelembagaan dan struktur pendidikan, mengingat kedudukan kurikulum adalah “menu” pendidikan yang selalu tidak dapat dipisahkan dari jiwa falsafah yang dianut oleh suatu negara atau bangsa. Maka ketika kita berbicara liberalisasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dengan budaya pandang suatu bangsa.

Dalam konteks kekinian, dunia pendidikan menuntut adanya kualifikasi baru dalam bidang keilmuan yang dapat mempersiapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar-standar kebutuhan pasar. Sementara konstruksi kurikulum lama masih berkuat pada kualifikasi keilmuan Islam yang terbatas pada wilayah-wilayah agama atau cabang-cabang ilmu agama (baca: keakhiratan) yang metodenya lebih banyak menghafal daripada proses penalaran yang sejalan dengan kondisi zaman. Karena itu kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh dunia pendidikan Islam baik Muhammadiyah, maupun Nahdatu Ulama yang di simbolkan dengan madrasah yang “*output*” pendidikan yang kemampuannya hanya terbatas dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial keagamaan atau keakhiratan. Sementara tuntutan baru “*output*” pendidikan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan dunia nyata (fisik) tidak dapat diberikan oleh dunia pesekolahan Islam sehingga dapat dirasakan pengaruhnya.

Masalah yang dihadapkan kepada konstruksi kurikulum lama di atas dapat dipahami sebagai akibat dari kejumudan dunia Islam yang terjadi dalam beberapa abad sesudah melalui zaman keemasannya (abad ke 5—9 M.). Imam Al-Ghazali yang lahir pada abad ke 10 kenyataannya tidak menolong untuk berkembangnya paham rasionalisme-liberal yang merupakan kunci dari zaman keemasan dunia Islam. Imam Al-Ghazali justru berupaya menyederhanakan persoalan umat Islam pada masanya dengan mengajak umat Islam untuk kembali menganut dan menekuni persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keagamaan (keakhiratan). Pengaruh Al-Ghazali yang demikian besar di dunia Islam terutama sesudah dimunculkannya karya “*Ihya ‘Ulumudin*” telah membawa dunia Islam yang terkooptasi dengan gagasan-gagasan keilmuan yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Apabila dilihat lebih jauh dari sudut konstruksi kurikulum lama, maka sesungguhnya konstruksi kurikulum tersebut tidak terlepas dari upaya umat Islam untuk mengakomodir gagasan-gagasan keilmuan yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali (Ashraf, 1985).

Hal tersebut merupakan salah satu fakta sejarah bila kita runut ke belakang, namun harus diakui bahwa dunia modern belum muncul, sehingga kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan keakhiratan belum terusik dengan kepentingan-kepentingan keduniaan, sebagaimana yang terjadi dan telah dirasakan oleh umat Islam sesudah datangnya era modern abad ke-19.

Jika dianalisis kurikulum pengembangan paradigma pendidikan Islam Muhammadiyah dan NU yang ada sekarang, apakah madrasah atau STAIN, IAIN, dan UIN, sesungguhnya sudah dapat dikatakan memiliki konstruksi baru apabila dibandingkan dengan konstruksi kurikulum lama sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya. Perguruan tinggi, STAIN, IAIN, dan UIN sekarang ini telah memiliki kualifikasi baru yang terlihat masuknya wilayah keilmuan baru yang berorientasi ke dunia. Di STAIN, IAIN, dan UIN sudah cukup lama dimasukkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ke dunia, meskipun masih terbatas pada kelompok ilmu sosial dan humaniora. Akan tetapi para praktisi dan profesional pendidikan masih merasakan adanya kesenjangan pada kurikulum dan lulusan yang dihasilkan oleh dunia pendidikan.

Jika dilihat dari konstruksi baru pengembangan paradigma pendidikan Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di atas, kelihatannya konstruksi kurikulum tersebut cenderung bersifat menjumlahkan dalam arti: kurikulum pengembangan paradigma pendidikan Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama adalah hasil penjumlahan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Kenyataannya kurikulum tersebut tidak hanya sekadar menjumlahkan, tetapi lebih dari itu, justru memperhatikan pengintegrasian keilmuan yang didukung oleh kemampuan profesional dalam pengimplementasiannya.

Konsep tersebut di atas agak memadai, tapi sesungguhnya menurut peneliti sebaiknya pimpinan lembaga perguruan tinggi mengambil keputusan strategis antara lain:

- a) Lembaga Perguruan Tinggi (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, STAIN, IAIN, dan UIN) sudah waktunya berubah, paling tidak ditata prodinya, sehingga mampu menelorkan sarjana yang memenuhi logika persaingan ke depan.
- b) Para Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi seyogyanya menyadari tanpa pengembangan kualitas para dosen pada jenjang akademik (S2 dan S3), maka cita-cita pengembangan ilmu dari berbagai aspek guna membudayakan khazanah berpikir yang kreatif, inovatif dan produktif dalam membangun peradaban Islam yang luhur merupakan hayalan.
- c) Seyogyanya para mahasiswa lebih diberi porsi dalam memberikan preferensi prodi yang dikembangkannya sehingga lebih aspiratif dan representatif sejalan dengan semangat pengembangan paradigma pendidikan Islam di masa depan.

Gagasan tersebut atas, seharusnya disikapi dengan cermat bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa maju dan berkembang tanpa ada lembaga dan keterlibatan dengan lembaga lain. Oleh karena itu sudah saatnya mengintegrasikan Ilmu Barat dan Ilmu Agama dalam pendidikan, artinya ada pendauran antara metode dan esensi berpikirnya. Adapun implementasinya bisa saja seorang mahasiswa kuliah di Perguruan tinggi Islam dan perguruan tinggi non-Islam, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan keahlian dan ilmu yang digelutinya. Dengan demikian akan menambah wawasan dan cakrawala berpikir yang signifikan. Produk seperti inilah akan memenuhi logika persaingan ke depan dan buah-pikirannya akan membumi dan menjaman.

### 3. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan paradigma pendidikan Islam khususnya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, berupaya untuk menumbuhkan pemahaman



dan kesadaran manusia sama di depan Tuhan. Tujuan manusia dalam pendidikan adalah kebebasan menuangkan ide-ide, yang tidak memungkinkan suatu individu memikul beban individu yang lain dan hanya berhak atas hasil kerjanya sendiri. Umat Islam adalah umat yang dinamis, orientasi dunia tidak boleh dikalahkan oleh orientasi akhirat sehingga produktivitas umat dalam berbagai bidang meningkat karena adanya antusiasme. Antusiasme adalah prasyarat kebebasan sehingga akan melahirkan kemakmuran intelektual.

Terkait dengan liberalisasi pengembangan paradigma pendidikan Islam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, maka seorang pendidik yang kritik-konstruktif selalu berusaha membuka diri pada pengembangan wawasan pendidikan keislaman yang dinamis. Salah satu di antaranya adalah dengan mendasarkan diri pada suatu penafsiran keislaman yang memihak kepada yang kecil, tertindas dan yang dipinggirkan. Pendidik yang kritik-konstruktif mencoba memperluas wawasan berpikir yang lebih toleran guna mewujudkan tatanan berpikir yang lebih sehat dan dinamis dalam membentuk budaya dan peradaban yang lebih elok dan anggun.

Bagi seorang pendidik yang baik kebaikan tertinggi adalah kecerdasan kritik-konstruktif yang dirumuskan dalam pemecahan masalah secara efektif baik ditingkat personal maupun sosial. Tujuan jangka panjang yang diinginkan dari pendidikan adalah melestarikan dan meningkatkan mutu tatanan sosial yang ada sekarang dengan cara mengajar setiap peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah kehidupannya sendiri secara efektif.

#### 4. Daftar Pustaka

- Al-Razi, M. ibn. A. B. ibn A. al-Q. (1994). *Mukhtar al-Sihah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amin, Q. (n.d.). *Tahrir Al-Mar'ah*. Kairo: Dar Al-Ma'arif.
- Ashraf. (1985). *New Horizon in Muslim Education*. London: The Islamic Academy, Cambridge University.
- Fadjar, A. M. (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Fakih, M. (1992). *Mencari Teologi Untuk Kaum Tertindas dalam 70 Tahun Harun Nasution dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat: Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, P. (1984). *Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan*. (A. A. Nugroho, Ed.). Jakarta: Gramedia.
- Freire, P. (1997). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan. dan Pembebasan*. (A. Prihantoro & F. A. Fudiyarto, Eds.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, P. (2003). *Pendidikan Masyarakat Kota*. Yogyakarta: LKiS.
- Harun, N. (1995). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Karim, M. R. (2005). *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurzaman, C. (1988). *Liberal Islam: A Sourcebook*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Mansur, A. (2006). *Paradigma Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: UI Press.
- O'neil, W. F. (2002). *Ideologi Ideologi Pendidikan*. (O. I. Naomi, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, M. D. (1992). *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Rasydiyanah, A. (1995). Butir-butir pengarahannya Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam dalam Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan

Pendidikan bagi Dosen Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum.  
Bandung.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Alqurān*. Bandung: Mizan.

Suwito. (2005). *Sejarah Sosial Islam*. Jakarta: Kencana.[]